

**PELATIHAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN DESA
BAGI APARAT KELEMBAGAAN PEDESAAN
DI KECAMATAN NAN SABARIS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
TGL. : 24 SEP 1997	
NO. / HARGA : K /	
KOLEKSI : K	
ENTRIS : 1055/K/97 - Pd (2)	
NO. : 302.003 3 709	

Oleh

DRS. SYAMSUL AMAR, MS, dkk

Dilaksanakan atas biaya :

Dana OPF IKIP Padang Tahun Anggaran 1995/1996
No. Kontrak : 40 /PT37.H.12/P/1995
Tanggal : 5 September 1995

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1995

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

TIM PELAKSANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

PELATIHAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN DESA
BAGI APARAT KELEMBAGAAN PEDESAAN
DI KECAMATAN NAN SABARIS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Ketua : Drs. Syamsul Amar, MS

Anggota : Drs. Abd. Manaf Tahir, MS

Drs. Alianis, MS

Drs. Zul Azhar

Drs. Sukardi

RINGKASAN

Lembaga pemerintahan desa adalah ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan karena dia berada pada dua posisi di satu pihak lembaga tersebut mempunyai legalitas dari pemerintah dan di lain pihak dia juga telah mendapat legitimasi dari masyarakat karena dia lahir berdasarkan keinginan dan masyarakat. Dengan keadaan demikian seharusnya lembaga pemerintahan desa akan mampu berperan dalam mengantisipasi permasalahan pedesaan dalam rangka mengujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kenyataannya lembaga pemerintah desa jauh berbeda dengan yang seharusnya, lembaga pemerintah desa sangat lemah dan rentan dengan segala persolan administratif. Hal ini disebabkan rendahnya kualifikasi aparat yang duduk pada lembaga tersebut. Rendahnya kualifikasi mengakibatkan rendahnya kemampuan dan kecakapan aparat dalam menjalankan fungsinya, pada akhirnya mekanisme pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di samping itu ditemukan ketimpangan antara aparat di tingkat atas (kecamatan dan kabupaten) dengan aparat di tingkat bawah (desa). Di satu pihak aparat di tingkat atas mempunyai kualifikasi yang relatif tinggi sementara di tingkat bawah (desa) kualifikasinya kurang memadai (rata-rata berpendidikan SMTP) akibatnya setiap program yang diturunkan ke desa tidak dapat diterjemahkan oleh aparat desa apalagi merencanakan pembangunan.

Berangkat dari permasalahan tersebut kami mencoba untuk membantu memecahkannya dalam bentuk kegiatan pelatihan manajemen pembangunan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat IKIP Padang. Pelatihan ini diisi dengan materi (1) Perencanaan pembangunan desa, (2) Pengelolaan Keuangan Desa dan (3) Surat Menyurat dan Kearsipan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkat kemampuan aparat desa di bidang manajemen pembangunan desa yaitu mampu

merencanakan pembangunan mampu mengelola keuangan dan surat menyurat. dengan hal demikian diharapkan lembaga pemerintahan desa mampu mengaktualisasikan fungsinya sebagaimana yang diharapkan.

Berangkat dari hasil tes yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang dilakukan telah dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. Hal ini terbukti dari persentase peningkatan pengetahuan peserta berdasarkan tes awal dan tes akhir yang dilakukan.

Pelatihan berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti hal ini terbukti dari respon peserta dalam mengikuti pelatihan yang cukup antusias.

KATA PENGANTAR

Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah dituntut melaksanakan misi Tridharmanya, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut dapat pula mengandung arti bahwa berperannya suatu perguruan tinggi tersebut dapat diukur atau tercermin dari pelaksanaan Tridharma itu. Pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya menggambarkan hubungan interaksi yang dilakukan oleh institusi dan lingkungannya yang didukung oleh unsur-unsur penunjang yang terkait. Dengan demikian misi pengabdian kepada masyarakat melambangkan bahwa perguruan tinggi merupakan bagian integral dari masyarakat.

Sumatera Barat merupakan salah satu bagian wilayah Indonesia yang sebagian besar rakyatnya tinggal di pedesaan. Untuk mempercepat proses pembangunan di pedesaan tersebut diperlukan keikutsertaan semua pihak, termasuk IKIP Padang sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban moral bagi IKIP Padang dalam melakukan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara langsung kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh IKIP Padang meliputi empat bentuk kegiatan yaitu pendidikan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, pembinaan/pengembangan Kulian Kerja Nyata dan pemberian informasi teknologi tepat guna di pedesaan.

Memang dewasa ini keempat bentuk pengabdian itu membutuhkan penyempurnaan, namun kenyataan menunjukkan bahwa pengamalan IPTEK ini oleh staf pengajar IKIP Padang dalam masyarakat, merupakan bukti kepedulian kita terhadap masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan mereka sejalan dengan tuntutan pembangunan daerah dan nasional.

Terlaksananya kegiatan ini mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya laporan ini adalah atas kerja keras dari tim pelaksana serta bantuan yang sangat berharga dari semua pihak. Dalam kesempatan ini seyogyanya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Pelaksana dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut.

Akhirnya marilah kita bermohon kepada Allah SWT, semoga seluruh jerih payah Tim Pelaksana dan bantuan semua pihak ini mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai amal saleh yang diterima di sisi-Nya. Amin !

Padang, Desember 1995

Lembaga Pengabdian Kepada
Masyarakat IKIP Padang,
K e t u a,

dto

Dr. H. Nurtain
NIP. 130252716

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	ii
PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Analisis Situasi.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT	5
A. Tujuan.....	5
B. Manfaat.....	5
BAB III KERANGKA PEMECAHAN MASALAH	6
BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	9
A. Realisasi Pemecahan Masalah.....	9
B. Khalayak Sasaran Kegiatan	10
C. Metode Pelaksanaan Kegiatan	10
V. HASIL KEGIATAN	11
A. Analisis Evaluasi.....	11
B. Hasil evaluasi	12
C. Faktor Pendorong	13
D. Faktor Penghambat	13
V. KESIMPULAN DAN SARAN	15
A. Kesimpulan.....	15
B. Saran-Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Berbicara masalah pedesaan yang segera muncul dalam ingatan kita adalah masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Masalah kemiskinan dan keterbelakangan tersebut merupakan hal yang rumit dan kompleks, jika hal tersebut dikelompokkan, akan kita temukan beberapa masalah kunci antara lain (a) rendahnya produktivitas, (b) adanya jurang pemisah antara kelompok kaya dengan miskin, (c) rendahnya partisipasi masyarakat dalam menunjang program pembangunan.

Permasalahan kunci tersebut akan menimbulkan dilema, di satu pihak desa memiliki permasalahan yang rumit dan kompleks, namun di sisi lain desa merupakan asset dalam pembangunan nasional mengingat potensi alamiah maupun manusiawi yang dipunyainya. Menyadari begitu pentingnya desa dengan segala potensi yang dimilikinya maka sejak awal repelita pertama masalah pedesaan telah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini terbukti dari berbagai macam program yang telah dilaksanakan di pedesaan.

Keberhasilan pelaksanaan program yang telah diperkenalkan oleh pemerintah sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya partisipasi dari masyarakat. Guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pedesaan telah dibentuk berbagai kelembagaan desa seperti LKMD, LMD, PKK, Karang Taruna, Lembaga pemerintahan desa.

Keragaan kelembagaan formal di pedesaan dalam mengaktualisasikan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang menanganinya. Kualitas sumberdaya tersebut terlihat dari tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparat kelembagaan desa tersebut. Tanpa adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat yang menangani kelembagaan desa, mustahil kelembagaan dimaksud akan dapat berfungsi sebagaimana yang dikehendaki.

Kecamatan Batang Anai sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari sepuluh desa. Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan ternyata sebagian besar dari aparat kelembagaan desanya berlatar belakang pendidikan SD dan SMTP hanya sebagian kecil saja diantara mereka yang berpendidikan SMTA. Dengan tingkat pendidikan tersebut diduga bahwa kemampuan mereka dalam mengelola kelembagaan desa masih relatif rendah. Hal ini terbukti dari aktivitas aparat kelembagaan desa dalam menjalankan fungsinya.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, kami staf pengajar IKIP Padang mencoba memberikan bimbingan dalam bentuk pelatihan dengan materi Manajemen Pembangunan Desa. Dengan harapan pelatihan ini akan bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat kelembagaan desa dalam menjalankan fungsinya.

B. Perumusan Masalah

Merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri, di tingkat kehidupan masyarakat pedesaan relatif rendah ketimbang masyarakat perkotaan, pada hal desa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan nasional. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pedesaan dewasa ini antara lain; (1) pemerataan hasil pembangunan yang belum begitu memadai dan (2) lembannya kelembagaan desa dalam menampung pertumbuhan ekonomi, terutama kelembagaan pemerintahan desa.

Wadah pemerintahan desa secara organisatoris sudah cukup mapan karena telah memperoleh legalitas dari pihak pemerintah. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan personil yang duduk pada kelembagaan desa tersebut. Secara jelas terlihat kepincangan antara kualifikasi aparat kelembagaan di tingkat atas (kecamatan, kabupaten) dengan kualifikasi aparat desa, akibatnya aparat kelembagaan desa kurang dapat menerjemahkan program yang ditetapkan ditingkat atas apalagi merencanakan.

Untuk itu perlu ada suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan manajerial aparat kelembagaan desa dalam berbagai hal, dengan demikian kelembagaan desa akan mampu berperan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan uraian di atas dapat diajukan permasalahan sebagai berikut;

1. Kelembagaan pemerintahan desa belum menjalankan fungsi administratif pembangunan;
2. Masih rendahnya kemampuan manajerial aparat kelembagaan pemerintahan desa dalam mengelola kelembagaan yang ada;
3. Masih rendahnya koordinasi antara kelembagaan desa yang ada dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Peserta memahami peranan administratif kelembagaan desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan pedesaan;
2. Meningkatkan pengetahuan peserta di bidang perencanaan pembangunan pedesaan;
3. Meningkatkan pengetahuan peserta di bidang strategi pembangunan pedesaan;
4. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun perencanaan dan menentukan skala prioritas pembangunan pedesaan;
5. Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola keuangan desa;
6. Meningkatkan kemampuan dalam bidang surat menyurat dan sistem kearsipan.

B. Manfaat

Dalam jangka panjang kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta di bidang manajemen pembangunan yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan eksistensi kelembagaan desa yang ada dalam mengantisipasi permasalahan pembangunan di pedesaan.

BAB III

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Pedesaan merupakan wilayah terluas yang ditempati oleh lebih kurang 67 % penduduk Indonesia, dengan demikian pedesaan haruslah ditangi secara lebih serius guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Poensiun (1967) pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, untuk itu jika hendak mengwujudkan pembangunan nasional, maka pembangunan pedesaan hendaklah mendapat perhatian oleh pemerintah baik di tingkat paling bawah (kecamatan) maupun di tingkat pusat.

Namun pedesaan masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan sebagaimana yang diungkapkan di atas. Permasalahan tersebut muncul salah satu diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan aparat desa dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. Akibatnya banyak proyek pembangunan pedesaan yang terbengkalai karena rendahnya partisipasi masyarakat.

Mengingat kesejahteraan masyarakat desa adalah sebagai hasil akhir dari proses pembangunan, namun hal ini tidak akan terlepas dari manajemen pembangunan yang dilakukan. Sistem manajemen pembangunan berkaitan dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari pemerintah pusat, daerah tingkat I dan II, kecamatan dan desa. Masing-masing tingkat mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta memiliki wadah manajemen

pembangunan seperti di tingkat pusat (Bappenas), di tingkat I dan II (Bappeda) dan di tingkat desa LKMD dalam satu wadah koordinasi UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) untuk tingkat kecamatan. Secara hirarchis setiap tingkat mempunyai wewenang untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan di wilayahnya sepanjang kegiatan tersebut saling mendukung dan tidak bertentangan dengan rencana yang berada di atasnya. Di samping itu perlu diciptakan koordinasi secara horizontal dengan instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan nantinya .

Kenyataannya manajemen pembangunan pedesaan belum terlaksana secara utuh sesuai dengan fungsi manajemen pembangunan itu sendiri. Desa lebih banyak berperan sebagai pelaksana dari perencanaan yang telah ditetapkan di tingkat atas, akibatnya timbul kesan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan sektoral yang berlokasi di pedesaan. Hal ini memperlihatkan bahwa wadah perencanaan yang ada pada masing-masing tingkat kurang diberi kesempatan untuk melaksanakan fungsinya. Secara lebih ekstrim pernah terjadi bahwa proyek pembangunan nasional yang dilaksanakan di salah satu kabupaten di Indonesia tidak diketahui oleh bupatinya.

Di tingkat desa LKMD merupakan wadah partisipasi masyarakat yang membantu kelembagaan desa pemerintahan desa merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Namun berdasarkan bukti empiris yang ada ditemukan bahwa LKMD tidak lebih hanya sebagai lembaga perpanjangan tangan

pemerintah dalam melaksanakan setiap program pembangunan. LKMD lebih banyak bernegosiasi ke atas dan meminta petunjuk dari atas ketimbang menggali potensi yang partisipasi masyarakat (Madrie, 1989).

Partisipasi masyarakat desa merupakan ciri utama dari pembangunan desa dan yang membedakannya dengan pembangunan sektoral lainnya. Namun partisipasi masyarakat desa jarang yang datang secara spontan untuk itu perlu adanya kelembagaan yang mampu merangsang partisipasi tersebut.

Partipasi masyarakat pedesaan secara riil relatif rendah, hal ini disebabkan pada umumnya kegiatan pembangunan yang dilakukan di pedesaan kurang menyentuh kepentingan masyarakat kecil karena tidak jelas kelompok sasaran yang akan dituju dari kegiatan pembangunan tersebut karena pembangunan itu tidak direncanakan dari bawah.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Realisasi Pemecahan Masalah

Untuk dapat memecahkan masalah yang telah dikemukakan dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

Sebelum kegiatan dilaksanakan ditempuh beberapa langkah persiapan antara lain :

- a. Melakukan survey pendahuluan ke Kecamatan Batang Anai untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh kelembagan desa;
- b. Menyusun proposal diajukan kepada Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Padang;
- c. Menetapkan materi-materi pelatihan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Berdasarkan hasil analisis. materi tersebut terdiri dari tiga topik yaitu:
 - (a) Perencanaan Pembangunan
 - (b) Pengelolaan Keuangan Desa
 - (c) Surat Menyurat dan Kearsipan.

2. Realisasi kegiatan

Kegiatan diselenggarakan tanggal 21 Desember 1993 dari jam 8.30 s/d 15.30, dihadiri oleh 21 orang peserta.

Acara dibuka oleh Sekwilcam Kecamatan Batang Anai Drs. Dasmiral , acara berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti.

B. Kalayak Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pelatihan adalah aparat kelembagaan pedesaan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LKMD dan Sekretaris LKMD pada sepuluh desa di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

C. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode penyampaian disesuaikan dengan materi dan kondisi peserta pada saat kegiatan. Namun secara teoritis metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi
4. Pemecahan Masalah

Materi yang telah disusun disampaikan oleh :

1. Perencanaan Pembangunan Desa oleh Drs. Abd. Manaf Tahir, MS
2. Pengelolaan Keuangan Desa oleh Drs. Syamsul Amar, MS
3. Surat Menyurat dan Kearsipan oleh Dr. Zul Ashar

BAB V

HASIL KEGIATAN

A. Analisis Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dalam kegiatan ini dilakukan tes (sebagai alat ukur) yang mengacu kepada tujuan dan materi yang telah ditetapkan. Untuk hal tersebut dilakukan beberapa langkah yaitu :

1. Melaksanakan tes awal (pre test), tes ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dasar dan persepsi peserta sehubungan dengan materi yang akan diberikan. Kegiatan ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk soal objektif yang terdiri dari soal pilihan ganda (multiple choice) dan betul salah (true false). Pengetahuan dasar peserta terhadap masing materi ceramah sebagai berikut: (1) Perencanaan Pembangunan Pedesaan, rata-rata peserta 20 %, (2) Pengelolaan Keuangan Desa 15 %, dan (3) Surat Menyurat dan Pengarsipan 10 %.
2. Tes akhir (post test) bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi pelatihan. Tes ini dilakukan dengan jalan mengulang kembali melaksanakan alat tes yang digunakan pada Pre test. Tingkat penguasaan rata-rata peserta untuk materi Perencanaan Pembangunan sebesar 75%, Pengelolaan Keuangan Desa 86 % dan Surat Menyurat dan Kearsipan 75 %. Jika hasil tes awal dibandingkan dengan tes akhir, maka

diketahui tingkat kenaikan rata-rata penguasaan peserta sebesar 67 %. Kenaikan tersebut adalah sebagai dampak positif dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan.

B. Hasil Evaluasi

Tingkat pencapaian sasaran dapat dilihat dari kesediaan khlayak sasaran mengikuti kegiatan latihan dan penataran selama kegiatan dilaksanakan. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran digunakan indikator persentase kehadiran dibandingkan peserta yang direncanakan. Peserta yang direncanakan sebanyak 30 orang sedangkan yang hadir pada saat pelatihan hari pertama 21 orang. Dengan demikian tingkat pencapaian sasaran adalah $(21/30 \times 100) = 61 \%$.

C. Faktor Pendorong

Kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan tanpa ada kendala yang berarti. Selama pelaksanaan peserta kelihatan cukup antusias dalam mengikuti ceramah-ceramah yang diberikan. Kondisi dinamis antara penceramah, panitia dengan peserta dapat diciptakan melalui komunikasi yang harmonis. Hal ini terlihat dari diskusi dan tanya jawab yang berlangsung selama kegiatan.

D. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan beberapa kendala namun kendala tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan. Kendala-kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan yaitu :

Berhubung bervariasinya tingkat pendidikan peserta ada yang berpendidikan SMTP dan ada juga yang SD dan SMTA

dan pada umumnya peserta berpendidikan SMTP, akibatnya tingkat pemahaman antar peserta cenderung berbeda-beda. Untuk mengetahui sejauhmana peserta menyukai kegiatan yang dilakukan pada akhir kegiatan disebarkan angket kepada mereka, dari angket yang disebarkan diperoleh informasi sebagai berikut: Sebanyak 18 orang (94%) peserta menyatakan kegiatan semacam ini sangat besar gunanya. 21 orang (100%) menyatakan materi-materi yang diberikan akan sangat membantu mereka dalam menjalankan kegiatannya, sebanyak 20 orang (98%) menyatakan cara penyampaian penceramah sangat baik sekali, sebanyak 18 orang (94%) menyatakan kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara terus menerus.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Aktivitas kelembagaan Desa di Kecamatan Batang Anai yang relatif masih rendah. Hal ini terlihat dari kemampuan manajerial apaarat lembaga dan koordinasi antara LKMD dengan kelurahan yang kurang harmonis. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai wadah perencanaan dan partisipasi masyarakat serta wadah penyalur aspirasi masyarakat belum dapat mengaktualisasikan fungsinya. Akibatnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa belum dapat mengatisipasi apa yang diperlukan oleh masyarakat.

Rendahnya aktivitas kelembagaan desa disebabkan oleh rendahnya kualifikasi aparat kelembagaan. Untuk meningkat kualifikasi aparat kelembagan telah dilaksanakan pelatihan manajemen pembangunan desa. Pelatihan yang dilakukan memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta, hal ini terlihat dari peningkatan pengetahuan peserta. Secara lebih kongkrit terlihat dari peningkatan pengetahuan peserta berdasarkan hasil tes yang dilakukan maupun dari respon yang diberikan oleh peserta selama mengikuti pelatihan. Dengan meningkatnya pengetahuan aparat diharapkan akan meningkat pula aktualisasi fungsi kelembagaan dalam pembangunan.

2. Saran-Saran

1. Untuk dapat mengetahui efektifitas pelatihan yang dilakukan kepada lembaga pengabdian masyarakat disarankan agar adanya monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan melalui peserta maupun terhadap aktivitas kelembagaan pemerintahan desa.
2. Untuk menjaga kesinambungan pengetahuan kalayak sasaran sebaiknya kegiatan yang sama dilakukan beberapa kali pada objek yang sama. Dengan demikian diharapkan para peserta memperoleh informasi yang cukup terhadap bidang kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anomious (1985). **Pedoman Teknis Pemerintahan Desa Dan Kelurahan**
Jakarta: Direktorat Pembinaan Pemerintahan Desa Departemen
Dalam Negeri.
- Anonimous (1992). **Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian
Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi.** Jakarta:
Direktorat Pebinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- A.H, Suharto (1982). **Pengelolaan dan Pembinaan Pemerintah Desa
dan Kelurahan.** Jakarta: CV Yulia.
- Kuswata, Agusta (1986). **Manajemen Pembangunan Desa.**
Jakarta: Bina Aksara.
- Misra (1987). **Multi Level Planing** New York: McRaw Hill.
- Ponsioen (1987). **Integrated Rural Deveplment**
New York: McRaw Hill

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Lampiran 1

Daftar Hadir Pelatihan Manajemen Pembangunan Bagi Aparat Desa
 di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
 Hari / Tanggal : Senin, tanggal 18 Desember 1995

No : Nama : Pekerjaan : Alamat : T.Tangan

1	Abou Bakar	Kep. Des Buayak Buayak		
2	Bachtiar RB	Sekdes/RKMD	P. Ulang	
3	Dakar	Ket. LKMD KTU	Meruak Kp.	
4	M. Nur	Sek. Des. RTU	Pilubing	
5	BUYUN	Sek Des	Karai	
6	Erman	Ket. LKMD	Karai	
7	Syafiq Rasyidin	VER DES K.T.S	Sirumbang	
8	MISLAWATI	SER DES. KBS	Sungai Pinang	
9	Syamsawir Daming	Kades Ks. T. S	Kp. Guei	
10	BOAT	Ket. LKMD Ks. T. S	P. Kumbang	
11	Ellen	Kep. Desa Kes. Jungah	Dulu	
12	Syafiq	KD. RTU	Kecamatan	
13	ARMAITA	Sek LKMD KTU	KTU	
14	MUSRIL	Sedes	KTU	
15	ADLIN.R	LKMD	Ket. utra	
16	Prisni	Kep. Desa	Meruak	
17	Bakar Dt. R. Putih	LKMD Desa P. Ulang	P. Ulang	
18	ARFAN KASMAHY	LKMD Desa Karang	Kito	
19	Suton Matorj	Tiluk Utra	Karang	
20	Bujang	Urao Desa Buayak	Buayak	
		anggota LKMD	Dulu	

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
CAMAT BATANG ANAI
Jalan Pancasila - Pasar Usang

Pasar Usang, 15 Desember 1995

Surat : 005/1900.a/Pem - 1995.-

Isi : -

Urgensi : Penting/segera.

Judul : UNDANGAN

K e p a d a :

Yth. Saudara Kepala Desa, Sekre-
taris Desa, Ketua LKMD dan
Sekretaris LKMD se Kep.
Batang Anai.

Dengan hormat,

Menghubungi surat kami No.005/1900/Pem-1995 tanggal 13 Desember 1995 perihal yang sama pada pokok surat ini, karena sesuatu dan lain hal acara tersebut terpaksa diundur.

Oleh karena itu sekali lagi kami undang Saudara kiranya dapat hadir pada :

H a r i : K a m i s

T a n g g a l : 21 Desember 1995.

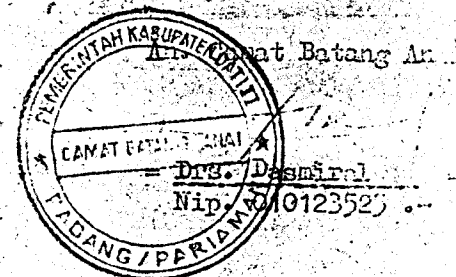
J a m : 00.00 wib s/d selesai.

T e m p a t : Hall Kantor Camat Batang Anai.

guna mengikuti " Pelatihan Manajemen Pembangunan bagi Aparat Kelembagaan pedesaan di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman " yang akan dilaksanakan oleh Staf pengajar IKIP Padang.

Selanjutnya kami tegaskan pada Sdr kiranya pelatihan dimaksud supaya dapat diikuti mengingat hal ini sangat erat kaitannya dengan beban tugas Sdr di Desa masing - masing terutama dibidang pembangunan pedesaan. Dan kehadiran Saudara sangat diharapkan tepat pada waktunya demi kelancaran pelaksanaan pelatihan dimaksud.

Demikian kami sampaikan pada Saudara untuk dapat diikuti sebagaimana mes



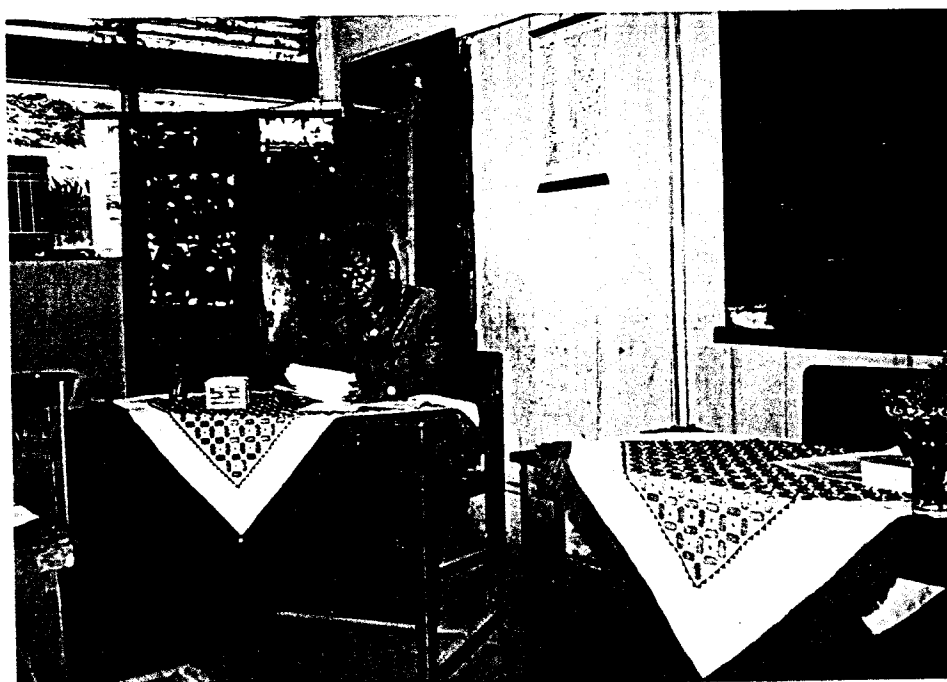
Penyampaian : Disampaikan kepada Yth .

1. Bapak Bupati Kdh Tk. II Padang Pariaman.

2. A r s i p.



Gambar 1. Drs. Syamsul Amer, MS sedang Menyampaikan Materi Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa



Gambar 2. Drs. Abd. Manaf Tahir, MS sedang Menyampaikan Materi Pelatihan Strategi Pembangunan Desa



Gambar 3. Drs. Zul Azhar sedang Menyampaikan Materi Pelatihan Surat Menyurat dan Sistem Kerasipan



Gambar 4. Sebagian Peserta Pelatihan Sedang Mengikuti Materi Pelatihan Yang Disampaikan Oleh Drs. Syamsul Amar, MS



Gambar 5. Peserta Pelatihan Sedang Memerjakan Tugas Kelompok Secara Terstruktur dibimbing oleh Instruktur Pelatihan Drs. Abd. Mamaf Tahir, MS



Gambar 6. Dua Orang Wakil Kelompok Sedang Mempresentasikan Hasil Tugas Kelompok